

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Polres Lombok Barat yakni dengan cara kekeluargaan atau proses perdamaian dimana pihak kepolisian melakukan mediasi sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban atau penyelesaian dengan cara non-ligitasi (penyelesaian di luar pengadilan). Di samping itu, pihak terlapor juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila dikemudian hari ternyata pelaku kembali melakukan tindak pidana tersebut, maka pelaku tidak akan melalui proses mediasi lagi, tetapi perkara akan langsung di tindak lanjuti ke tingkat pengadilan. Hal ini perlu dilakukan agar pihak terlapor ataupun masyarakat lainnya, tidak berlindung dibalik itikad baik kepolisian melalui diskresinya untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Adapun jumlah kasus tindak pidana perzinahan yang ditangani oleh pihak penyidik PPA Polres Lombok Barat sebanyak 13 kasus dan semua kasus tindak pidana perzinahan tersebut diselesaikan dengan cara non-ligitasi (di luar pengadilan).

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi di Polres Lombok Barat yaitu berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat, sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penyusun memberikan ide berupa saran sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.
2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Artadi, Ibnu. 2013. *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penangkapan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)*. Cetakan ke-1. Deepublish. Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul asis. 1996. *Ensiklopendi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Honeve. Jakarta.
- Djubaidah. 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*. Kencana. Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Cetakan ke-1. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Laksbang Mediatam. Yogyakarta.
- Hasbi, Ridwan. 2012. *Hamil Duluah Nikah Kemudian*. Daulat riau. Pekanbaru.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Delik-Delik Khusus*. CV Mandar Maju. Jakarta.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.

- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UI Press. Yogyakarta.
- Sadjiyono. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-2. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2011. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implemetasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Shihab, Quraish. 2008. *Tafsir Al-misbah dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera hati. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Rajawali. Jakarta.
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Cetakan ke-1. Prestasi Pustaka. Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

<http://repository.unika.ac.id/>, diakses tanggal 20 Mei 2020, pukul 21.15 WITA.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No: 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : RIZKI MAULUDIN
NIM : 616110095
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3.75

DOSEN PS I : PROF. DR. HJ. RODLIYAH, SH, MH DOSEN PS II : FAHRURØZI, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	15 mei	Perbaiki Cara belakang masalah		da
2.	20 mei	perbaiki Tinjauan pustaka		da
3.	24 mei	Perbaiki Metode penulisan dan ACC		da
4.	26 mei	Perbaiki Cara belakang Masalah	Rod	
5.	7 juni	Perbaiki Footnote dan Tinjauan Pustaka	Rod	
6.	10 juni	ACC	Rod	
7.	17 juni	Perbaiki Pembahasan		da
8.	22 juni	Perbaiki Kesimpulan dan Saran		da
9.	27 juni	ACC		da
10.	29 juni	Perbaiki Footnote dan Pembahasan	Rod	
11.	30 juni	Perbaiki Daftar Pustaka . Kesimpulan	Rod	
12.	4 juni	Perbaiki Saran	Rod	
13.	5 juni	ACC	Rod	

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMA DEWI, SH, MH)
NIDN. 0828078501